

Budidaya Udang Supra dengan Fasilitas Perbankan



Jakarta, Harian Nusantara - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengaku tidak muluk-muluk untuk pengembangan program budidaya udang supra dengan fasilitas pembiayaan perbankan. Fasilitas kredit perbankan untuk kelompok budidaya udang supra hanya untuk dua kelompok per kabupaten. "Kami akan uji coba untuk pembiayaan (fasilitas perbankan) ini. Kami sedang pilih daerahnya. Yang sudah kami identifikasi, antara lain Subang, Indramayu (Jawa Barat). Karena kami lihat, daerahnya sudah maju," Dirjen Perikanan Budidaya (DJPB) KKP Slamet Soebjanto mengatakan kepada Harian Nusantara beberapa waktu yang lalu.

Udang merupakan salah satu komoditas utama dalam industrialisasi perikanan budidaya. Komoditi ini memiliki nilai ekonomis tinggi (*high economic value*). Permintaan pasar juga tinggi (*high demand product*). Udang bahkan sampai saat ini merupakan primadona ekspor produk perikanan budidaya. KKP terus mengembangkan inovasi baru dalam budidaya udang. Salah satu teknologi yang diterapkan adalah teknologi supra intensif berbasis *blue economy*. Teknologi ini mampu meningkatkan panen udang lebih baik dari biasanya. Diantaranya, tambak

udang supra intensif di Kabupaten Barru Sulawesi Selatan, mampu memproduksi udang 153 ton per hektar.

Fasilitas kredit perbankan parallel dengan program yang sudah lebih dulu berjalan, yaitu revitalisasi tambak. Beberapa daerah yang sudah teridentifikasi, mengalami perkembangan kegiatan budidaya ikan dan udang. Sehingga tanpa program kemitraan sebelumnya, pembudidaya di Subang, Indramayu sudah berhasil panen besar. "Tetapi kami tidak membatasi berapa banyak (kelompok budidaya). Kami masih sedang hitung-hitung luasan (hektar) dengan biayanya. Hitungan awal, per hektar perlu dana Rp350 juta."

Biaya tersebut masih sangat kasar. Karena berbagai keperluan untuk budidaya sangat beragam, sangat tergantung dari kondisi cuaca, lokasi dan lain sebagainya. Langkah awal, KKP akan menerapkan program bantuan tanpa bunga (bank). Selain itu, pembudidaya juga terlibat secara tidak langsung dalam management pembiayaan. "Mereka ikut di dalam, ikut sharing keuntungan. Ini bank swasta, kami akan barengi dengan pendampingan. Prinsip (bank) Syariah juga berlaku, karena tanpa bunga. Kami akan monitor sehingga penggunaan uang

bisa tepat, tidak ada penyalah-gunaan."

Di sisi lain, KKP juga mengidentifikasi berbagai tambak udang di sepanjang Pantura. Kondisi hatchery atau benih-benihnya harus dijaga, sehingga tidak tergerus oleh berbagai bencana. Selain banjir, abu Gunung Kelud, beberapa hatchery juga harus menjaga dari serangan penyakit EMS (*early mortality syndrome*), *acute hepatopancreatic necrosis disease*. "Sekarang musim hujan, matahari sangat jarang. Pengaruhnya pada produksi benih yang sangat tergantung pada plankton. Plankton tergantung matahari. Cuaca seperti sekarang ini, kita tidak bisa berharap banyak."

Inovasi teknologi supra intensif sendiri merupakan hasil penemuan Hasanuddin Atjo, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah. Budidaya udang supra intensif mengintegrasikan sistem budidaya hulu dan hilir. Dimana sistem ini mengutamakan penggunaan benih unggul, standarisasi sarana dan prasarana, penggunaan teknologi budidaya yang akurat dan tepat, pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan serta pengelolaan usaha yang baik. Dimana kelimanya harus diimplementasikan secara simultan dan konsisten.

Budidaya udang supra intensif berbasis *blue economy*, menjadikan limbah sebagai bahan baku pakan ikan nila dan juga sebagai pupuk tanaman. Prinsip penggunaan teknologi dalam budidaya udang supra intensif salah satunya adalah untuk mengendalikan limbah organik. Sehingga setiap 6 jam sekali limbah organik dibuang secara mekanik, menggunakan central drain yang ada di dasar tambak, untuk mengurangi racun dalam air. Kadar oksigen dalam air juga dijaga dengan menggunakan kincir air, turbo jet dan blower. "Sedangkan untuk pemberian pakan digunakan *auto feeder* yang sudah diprogram frekwensi dan jumlah pakan yang diberikan." (Liu)

Ketua KPK Berharap Jokowi Mampu Benahi Birokrat

Jakarta, Harian Nusantara - Pemprov DKI Jakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali meningkatkan kerjasama dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Kali ini kedua lembaga itu menggelar penandatanganan komitmen dan sosialisasi program pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemprov DKI.

Penandatanganan dihadiri langsung Ketua KPK Abraham Samad, Gubernur DKI Joko Widodo, Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama. Dalam kesempatan itu, Abraham Samad juga memberikan penghargaan kepada Pemprov DKI terkait pelapor terbanyak dalam hal penerimaan gratifikasi.

Abraham Samad juga menyambut positif adanya komitmen pengendalian gratifikasi yang akan diterapkan di lingkungan Pemprov DKI. "Penerimaan gratifikasi atau suap - menyuap ini sebenarnya menjadi kejahatan luar biasa. Sedangkan di Indonesia, kita terima uang pelicin, pungutan liar dianggap hal biasa. Bahkan, pejabat tinggi di luar negeri yang ketahuan menerima gratifikasi akan dikenakan sanksi pidana dan mundur dari jabatannya," ujar Samad di Balaikota, Selasa (4/3).

Gratifikasi, lanjut Samad, diartikan sebagai pemberian dalam arti luas. Apapun bentuknya, seorang penyelenggara negara atau PNS yang menerima sesuatu maka itu bisa dikategorikan sebagai gratifikasi. Tak hanya itu, sambung Samad, pemberian diskon yang diluar kewajaran juga merupakan bentuk kejahatan gratifikasi. "Pemberian fasilitas yang diterima pejabat yang berwenang memberi izin kepada investor. Di antaranya traktir makan, dibawa ke tempat hiburan juga masuk kategori gratifikasi," tuturnya.

Guna menghindari kejahatan gratifikasi, sesuai aturan hukum yang berlaku, setiap orang diberikan kesempatan untuk melaporkan dalam kurun waktu selama 30 hari setelah menerima barang atau sesuatu yang dianggap terindikasi suap. "Kalau pemberian itu dilaporkan dalam kurun waktu 30 hari, maka tidak masuk kategori pidana. Pelaporan serupa dilakukan oleh Jokowi saat menerima gitar dari Metallica," tuturnya.

Samad mengaku prihatin atas angka IPK yang masih stagnan berada di posisi poin 32. Kondisi tersebut disebabkan pelayanan publik masih buruk. Praktik penyuapan, uang pelicin yang terjadi di sektor pelayanan publik merupakan kategori kejahatan korupsi kecil namun sangat mengganggu masyarakat kecil.

"Pengendalian gratifikasi menjadi mutlak untuk diterapkan oleh Pemprov DKI karena berada di sentra pemerintahan dan bisnis yang memiliki posisi strategis. Terlebih pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat serta estimasi perputaran uang di Jakarta mencapai 70



persen dari uang yang beredar di Indonesia. Di tambah lagi APBD DKI sangat besar dibandingkan provinsi yang ada," katanya.

Ditambahkan Samad, berdasarkan hasil survei Indeks Integritas Publik yang dilakukan oleh KPK pada tahun 2013 silam, posisi di atas standar minimal dengan angka 7,4 persen dari 180 pengguna layanan publik di Jakarta menyatakan biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan biaya resmi. Temuan pembayaran tidak sesuai tersebut terbesar terjadi pada unit layanan pengadaan barang dan jasa.

"KPK berharap Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Jokowi - Ahok walau masih berusia muda, mampu membenahi birokrat di tingkat bawah. Kita paham penyakit birokrasi dari sabang sampai merauke sama semua, selalu memperpanjang birokrasi, mempersulit perizinan untuk dimanfaatkan oleh oknum tertentu menarik keuntungan pribadi," tandasnya.

Kita berharap dengan adanya penandatanganan komitmen pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemprov DKI menjadi DKI Jakarta menjadi contoh bagi kementerian dan lembaga lain agar supaya bisa meniru langkah yang dilakukan pemprov DKI.

Menurut Samad, reformasi birokrasi yang digalakkan Pemprov DKI saat ini di antaranya seleksi lurah dan camat sangat berdampak pada pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat.

Namun, untuk memaksimalkan efek positif dari reformasi birokrasi, Pemprov DKI juga perlu menerapkan pengendalian gratifikasi yang lebih luas, kontiniu dan terkonsep secara baik.

"Pemprov DKI diharapkan menjadi champions (juara) dalam penggunaan dan pemanfaatan kepatuhan terhadap pelaporan gratifikasi sebagai komponen penting untuk mengukur indeks integritas individu yang digunakan dalam pemberian insentif promosi jabatan kepada pegawai di lingkungan Pemprov DKI," tandasnya. (BeritaJakarta)

Basuki Enggan "Kawin" dengan Prabowo dan Jokowi

Jakarta, Harian Nusantara - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjadi salah satu kandidat cawapres yang berpotensi mendampingi Joko Widodo atau Prabowo Subianto. Jika disuruh memilih, Basuki memilih menjadi cawapres Prabowo.

Menurut Basuki, Prabowo telah lebih dulu menawarkan dirinya menjadi cawapres. Sehingga, dia tidak mungkin mengiyakan jika diminta menjadi cawapres mendampingi Jokowi.

"Kamu mau ngajak ribut. Sudah diajak

Prabowo, juga diajak Jokowi juga. Masa mau kawin sama dua orang. Saya tidak mau, ah," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota Jakarta, Rabu (5/3/2014).

Walaupun, kata Basuki, kelak dia tidak terpilih oleh Prabowo sebagai cawapresnya, dia tetap konsisten. Dia tidak akan melompat menjadi cawapres untuk capres lainnya.

"Ini situasinya berbeda saat di DKI. Kalau di DKI kan, Ibu Mega tidak mau maju jadi gubernur dan Pak Prabowo juga tidak mungkin maju gubernur, makanya

kita, kan? Nah, kalau ini Pak Prabowo maju, gimana mau maju sama Pak Jokowi," katanya lagi.

Mengalihkan pembicaraan menjelang Pemilu 2014, tiba-tiba Basuki memuji Jokowi yang wajahnya mirip Presiden Amerika Serikat Barack Obama.

"(Jokowi) Mukanya kaya Obama, kan? Keren, he-he-he. Supaya nanti ketemu Obama, sama-sama ada mukanya Obama. Mirip kan? Kalau diliat sekilas dari samping gitu di majalah, he-he-he," ujarnya sambil tertawa. (Kompas.com)



Peluncuran Autobiografi 'Hujan Safir'

Jakarta, Harian Nusantara - Meyda Sefira pemeran tokoh Husna dalam film Ketika Cinta Bertasbih Karya Habiburrahman El Shirazy, meluncurkan Songbook Hujan Safir di Jakarta (5/3). Buku terbitan MCM Publishing dan bekerja sama dengan ACT ini merupakan buku autobiografi karyanya.

Tema yang diangkat dalam launching kali ini adalah; "Hujan Safir Melipuri Hujan Pasir Kelud", sengaja mengambil tema itu, karena dalam acara tersebut juga dilakukan penggalangan bantuan untuk korban letusan gunung Kelud.

Meyda mengambil judul Hujan Safir, karena menurutnya hujan itu mempunyai arti filosofis perjuangan. Proses menjadi hujan adalah proses perjuangan dimulai dari awan turun ke gunung, mengalir ke lembah mengalir ke tempat lebih rendah, solokan, kali, sungai dan pada akhirnya bermuara di laut.

"Proses itu perlu perjuangan, sehingga melalui proses tersebut menimbulkan manfaat bagi alam sekitar, saya ingin bermanfaat seperti hujan,"ungkapnya. Sedangkan safir menurutnya diambil dari nama terakhirnya dia, yaitu Safira sehingga terciptalah judul buku ini.

Rencananya 100 persen hasil dari penjualan buku ini seluruhnya akan didonasikan

untuk pembangunan pabrik roti di Suriah, dalam upaya membantu korban perang saudara di sana.

Menurut Nurman Priatna, Direktur CSC (Creative Strategic Communication)-ACT, Meyda Sefira adalah sosok humanis, public figur yang bagi generasi muda sangat di butuhkan sosoknya. Kenapa seperti itu? Karena anak muda biasanya sering dicap cuek, individualistis, ababil dan hal lainnya yang kesannya mengukung untuk berbagi dengan orang lain.

"Meyda adalah salah satu brand ambassador ACT, seorang sahabat kemanusiaan yang sangat peduli, karena setiap berbagai aksi kemanusiaan biasanya dia ikut, menghibur anak-anak pengungsi dan kepeduliannya terhadap warga Suriah, serta berbagai hal dalam kesehariannya itu menunjukkan betapa dia sangat peduli," terangnya.

Sebelum acara launching, undangan yang hadir dihibur dengan empat lagu religi yang di sajikan Band Religi DEBU. Mustofa vokalis Band Religi DEBU sangat mengapresiasi kegiatan yang di gelar ACT bersama Meyda Sefira.

"ACT benar-benar cepat tanggap, banyak sekali acara yang di gelar ACT. Acara launching dan penggalangan bantuan untuk korban bencana letusan gunung Kelud ini keren, momennya tepat sekali,"tuturnya. (zl)

Proyek Monorel, PT JM Lakukan Survei Tanah



Jakarta, Harian Nusantara - Proses pengerjaan proyek monorel di Jakarta kembali berlanjut. PT Jakarta Monorail sebagai pelaksana kerja sama pembangunan monorel di Jakarta memulai fase prakonstruksi dengan menggelar survei penyelidikan tanah (soil investigation) di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur.

Titik pemberhentian pertama jalur monorel Blue Line yang menghubungkan Kampung Melayu dengan Taman Angrek, Jakarta Barat.

Direktur Teknis PT Jakarta Monorail (JM), R Bovanantoo mengatakan, survei tanah di jalur sepanjang 13,7 kilometer ini akan berlangsung 100 hari melalui kegiatan uji tanah di setiap jarak 100 meter serta penggalan hingga kedalaman 30 meter untuk mendapatkan sampel tanah.

"Penyelidikan tanah adalah salah satu langkah paling penting dalam proses konstruksi," ujar dia dalam keterangan tertulisnya, (5/3).

Dia menjelaskan, proses ini penting untuk menyiapkan desain pondasi yang tepat pada setiap lokasi. Survei ini kata dia, akan dilakukan lebih agresif untuk membantu percepatan pembangunan konstruksi monorel, di mana kriteria dari settlement hanya diberi toleransi tiga milimeter.

"ini juga penting untuk menjamin keamanan para penumpang nantinya," imbuhnya.

Sekadar diketahui, jalur Blue Line adalah satu dari dua jalur monorel yang dikerjakan PT JM. Selain Blue Line, PT JM mengerjakan jalur Green Line yang melingkar sepanjang 14,3 kilometer dari Palmerah, SCBD, Kuningan Sentral, Karet, kembali ke Palmerah.

PT JM merancang dua stasiun interchange di Kasablanka dan Karet untuk penumpang beralih di antara dua jalur, serta membangun stasiun Dukuh Atas untuk penumpang beralih ke Busway, MRT, atau Commuter Line.

Di koridor Green Line, PT JM juga sudah melanjutkan pekerjaan dengan melakukan kegiatan pondasi bore pile di Taman Setiabudi Utara, yang dilanjutkan dengan beberapa pengujian pile seperti thermal test, PIT, dan loading test. (Okezone)